

# **Postspaarbank dan Perkembangan Aktivitas Menabung Masyarakat Bumiputra di Jawa, 1900-1939**

**SORAYA ANUGRALIA<sup>1</sup> & ABDUL WAHID<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Alumnus Sarjana Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>2</sup> Dosen Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email korespondensi: [soraya.anugralia@mail.ugm.co.id](mailto:soraya.anugralia@mail.ugm.co.id)

## **Abstract**

This article examines the important of the *Postspaarbank* in facilitating the development saving activities of the bumiputra in Java during the period 1900–1939. Although bumiputra communities lived under structural poverty during the period, the available data indicate their participation in savings institutions, especially in the *Postspaarbank*. Drawing on the annual bank reports of *Postspaarbank*, government archives, and contemporary publications, the article argues that saving activities were not merely an outcome of economic rationality, but were shaped by an institutionalized state intervention. This include through automatic salary deductions, school savings programs, and the integration of savings services into the postal network through the *Postspaarbank*. This article finds out the clear differences between the *Postspaarbank* and private savings banks, while the first, perform relatively stable growth in savings, even during the periods of crisis such as the Great War and the Great Depression, the latter experienced sharp fluctuations, characterized by unstable number of bumiputra depositors but higher individual saving. These was closely related to the social backgrounds of depositors: the *Postspaarbank* primarily served salaried groups working in the colonial bureaucracy, while private banks cater the urban economic elites. Overall, this article demonstrates bumiputra saving activities formed part and parcel of a top-down process of financial modernization and fiscal control of the colonial state.

## **Keywords:**

saving;  
bumiputra  
society;  
colonial  
savings banks;  
Postspaarbank;  
Java

## **Abstrak**

Artikel ini mengkaji peran penting *Postspaarbank* dalam memfasilitasi perkembangan aktivitas menabung masyarakat bumiputra di Jawa pada periode 1900–1939. Meskipun masyarakat bumiputra hidup dalam kondisi kemiskinan struktural pada masa tersebut, data yang tersedia menunjukkan adanya partisipasi mereka dalam lembaga-lembaga tabungan, terutama melalui *Postspaarbank*. Dengan memanfaatkan laporan tahunan *Postspaarbank*, arsip pemerintah kolonial, serta berbagai terbitan sezaman, artikel ini menunjukkan bahwa aktivitas menabung tidak semata-mata merupakan hasil rasionalitas ekonomi individu, melainkan dibentuk oleh intervensi negara yang terinstitusionalisasi. Intervensi tersebut antara lain diwujudkan melalui sistem pemotongan gaji secara otomatis, program tabungan sekolah, serta integrasi layanan tabungan ke dalam jaringan kantor pos melalui *Postspaarbank*. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara *Postspaarbank* dan

## **Kata Kunci:**

menabung;  
masyarakat  
bumiputra;  
bank tabungan  
kolonial;  
Postspaarbank;  
Jawa

bank-bank tabungan swasta. *Postspaarbank* mencatat pertumbuhan tabungan yang relatif stabil, bahkan pada masa krisis seperti Perang Dunia I dan Depresi Besar, sementara bank-bank tabungan swasta mengalami fluktuasi yang tajam, dengan jumlah penabung bumiputra yang tidak stabil namun nilai simpanan per individu relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut berkaitan erat dengan latar belakang sosial para penabung: *Postspaarbank* terutama melayani kelompok berpendapatan tetap yang bekerja dalam birokrasi kolonial, sedangkan bank-bank swasta lebih banyak melayani elite ekonomi perkotaan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa aktivitas menabung masyarakat bumiputra merupakan bagian integral dari proses modernisasi keuangan yang bersifat *top-down* sekaligus berfungsi sebagai instrumen kontrol fiskal negara kolonial.

## Pendahuluan

Menabung dalam masyarakat Jawa memiliki makna yang luas, tidak sekadar menyimpan uang sebagai cadangan, tetapi merupakan strategi hidup yang mencakup pengelolaan berbagai aset seperti barang, hewan ternak, tenaga kerja, dan jaringan sosial yang berakar pada nilai gotong royong dan resiprositas (Prapto Yuwono dkk. 2002, 1-2). Dalam kerangka makna tersebut, maka aktivitas menabung di kalangan masyarakat Jawa sudah dikenal sejak masa berburu dan meramu dalam bentuk penyimpanan bahan pangan, lalu berkembang pada masa bercocok tanam dengan pembuatan lumpung dan teknik pengawetan hasil laut serta peternakan (Supratikno Rahardjo dkk. 2019, 19).

Jejak awal aktivitas menabung dalam bentuk uang dapat ditelusuri sejak masa Majapahit, ketika uang sudah dikenal sebagai alat tukar, sebagaimana terbukti dengan temuan arkeologis celengan (dalam KBBI didefinisikan sebagai tabung pekat untuk menyimpan uang; tabungan; uang simpanan) dan uang *kepeng* di situs Trowulan (Supratikno Rahardjo dkk. 2019, 39). Berkaitan dengan hal tersebut, uang dalam bentuk koin emas dan perak bahkan sudah mulai diproduksi di Jawa sekitar akhir abad ke-8 Masehi, yang digunakan untuk pembayaran pajak dan transaksi harian. Penggunaan uang koin pada masyarakat Jawa semakin berkembang karena aktivitas perdagangan. Diperkirakan, sejak abad ke-10 Masehi, masyarakat Jawa telah terlibat aktif dalam jaringan perdagangan di tingkat regional, antar-pulau, hingga internasional (Christie 1998, 353).

Aktivitas menabung dalam bentuk uang menjadi semakin populer dan berkembang luas di masyarakat, ketika monetisasi semakin terlembagakan seiring berkembangnya lembaga keuangan modern, khususnya perbankan di bawah sistem politik ekonomi kolonial. Demikianlah, sejak pertengahan abad ke-19, sejumlah lembaga perbankan yang memfokuskan kerjanya di bidang pengembangan tabungan mulai berkembang di Jawa. Pendirian bank tabungan mula-mula dilakukan oleh organisasi filantropis Belanda, misalnya *Maatschappij tot Nut van het Algemeen* yang kemudian untuk kategori

ini disebut dengan bank tabungan swasta. Bank-bank tersebut adalah *De Spaarbank te Semarang* yang berdiri pada tahun 1853, *De Bataviasche Spaarbank* (1857), dan *De Spaarbank van de Maatschappij Tot Nut Van Het Algemeen te Soerabaja* (1859). Pemerintah Hindia Belanda sendiri kemudian mendirikan *Postspaarbank* pada 1898, yang terhubung dengan jaringan pos di seluruh Hindia Belanda. Meskipun pemerintah kolonial mengklaim bahwa tujuan pendirian *Postspaarbank* adalah untuk menumbuhkan kebiasaan menabung dan memperkuat ekonomi bumiputra, pada kenyataannya sebagian besar dana yang dihimpun justru dialirkan ke Belanda (Bree 1918, 477). Baik bank tabungan swasta maupun pemerintah menggunakan istilah “*spaarbank*” sebagai nama lembaga yang secara harfiah berarti “bank tabungan”.

Kemunculan bank tabungan milik pemerintah maupun swasta juga menimbulkan persoalan mendasar tentang sejauh mana masyarakat bumiputra yang hidup dalam kondisi serba kekurangan mampu menyisihkan uang untuk ditabung. Kemiskinan struktural yang melanda masyarakat bumiputra, khususnya di pedesaan Jawa, salah satunya berakar pada ketimpangan kepemilikan lahan di bawah sistem kolonial. Pada tahun 1926, sekitar 38% rumah tangga di pedesaan Jawa tidak memiliki lahan dan bergantung hidup sebagai buruh tani berupah rendah dalam sistem bagi hasil yang eksploitatif (Alexander, J., & Alexander, P. 1982, 603). Beban ekonomi ini diperparah oleh sistem perpajakan kolonial yang berat, seperti pajak kepala, pajak tanah, dan pajak hasil bumi, yang kerap melebihi kemampuan finansial mereka (Dick 1985, 82).

Meskipun sebagian besar masyarakat bumiputra hidup dalam kemiskinan, pendirian bank tabungan menunjukkan bahwa terdapat segmen tertentu dalam masyarakat bumiputra yang dianggap memiliki kapasitas finansial untuk menabung uang di bank. Data *Postspaarbank* mencatat bahwa antara tahun 1898 hingga 1903, sekitar 41% penabung berasal dari kalangan bumiputra (*Java-post; weekblad van Nederlandsch-Indië*, jrg 2, 1904, no. 28, 09 Juli 1904). Selain itu, pada tahun 1920, 456 penabung bumiputra juga tercatat menabung di bank swasta *De Spaarbank van de Maatschappij Tot Nut Van Het Algemeen* di Surabaya, dengan rata-rata simpanan per individu mencapai f400 (Bree 1918, 515). Kelompok ini terutama berasal dari golongan priayi baru (priayi profesional) yang memperoleh pendidikan Barat dan bekerja sebagai guru, dokter, atau pegawai administratif pemerintah kolonial (Scherer 2012, 5-8). Golongan priayi ini memiliki pendapatan tetap, karena memiliki posisi tertentu dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial. Dengan penghasilan antara f70 hingga f1000 per bulan, mereka mampu menabung, meskipun gaya hidup konsumtif dan hedonistik sering kali menghambat akumulasi kekayaan lebih lanjut (Scherer 2012, 14).

Historiografi tentang aktivitas menabung di kalangan masyarakat Indonesia sudah ditulis oleh beberapa orang sejarawan, namun demikian

jumlahnya masih terbatas, serta belum ada yang membahas secara spesifik tentang aktivitas menabung penduduk bumiputra pada masa kolonial. Salah satu kajian yang relevan adalah tulisan Mufidha Brilian Irianti (2014), yang menyoroti sejarah menabung pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya dalam rentang waktu 1941–1945. Dalam kajiannya, Mufidha memfokuskan perhatian pada propaganda menabung yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang melalui berbagai saluran media massa. Ia menelusuri strategi-strategi yang digunakan penguasa militer Jepang untuk mendorong masyarakat membuka tabungan di lembaga keuangan formal sebagai bagian dari strategi mobilisasi sumber daya untuk mendukung kepentingan perang Jepang.

Karya berikutnya dihasilkan oleh Prapto Yuwono dan tim (2002) yang membahas aktivitas menabung dalam masyarakat Surakarta, dengan fokus utama pada bentuk-bentuk tabungan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat. Sementara itu, Supratikno Rahardjo, Nunus Supardi, dan Erwien Kusuma (2019) dalam bukunya membahas tentang sejarah panjang tradisi menabung di Indonesia secara lebih umum mulai dari periode masa prasejarah hingga era kontemporer. Hanya saja, pembahasan mengenai masa kolonial dalam buku tersebut masih sangat umum dan belum menyoroti secara spesifik aktivitas menabung di kalangan masyarakat bumiputra. Oleh karena itu, karya ini menunjukkan adanya perubahan aktivitas menabung pada masyarakat bumiputra pada masa kolonial yang mulai menggunakan institusi bank untuk menyimpan uang. Uang tidak lagi sekadar alat tukar, tetapi mulai dipersepsikan sebagai aset berharga yang dapat disimpan di bank dan memberikan keuntungan melalui bunga tabungan.

Dari penelusuran pustaka di atas, bisa disimpulkan bahwa kajian yang secara spesifik membahas mengenai sejarah aktivitas menabung masyarakat bumiputra pada masa kolonial masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini bermaksud untuk mengisi kekosongan historiografis dan menunjukkan perubahan aktivitas menabung pada masyarakat bumiputra. Adapun permasalahan utama yang akan dijawab adalah mengapa aktivitas menabung uang di bank oleh masyarakat bumiputra di Jawa pada masa kolonial bisa berkembang meskipun secara umum kemampuan ekonomi mereka relatif lemah? Untuk menjelaskan dinamika tersebut, penelitian ini secara khusus berupaya mengungkap alasan yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat bumiputra dalam aktivitas menabung uang di bank. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memetakan jumlah masyarakat bumiputra yang menabungkan uangnya dari waktu ke waktu, sekaligus menelaah latar belakang sosial mereka. Terakhir, penelitian ini mengidentifikasi bank-bank tabungan yang digunakan oleh masyarakat bumiputra serta menjelaskan strategi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menarik minat penabung dari kalangan bumiputra.

Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penelitian ini dibatasi secara spasial pada wilayah Pulau Jawa karena persebaran bank-bank tabungan pada masa kolonial paling terkonsentrasi di kawasan ini serta perannya sebagai pusat administratif, ekonomi, dan pendidikan yang membentuk dinamika sosial-ekonomi masyarakat bumiputra secara kompleks, sementara wilayah di luar Jawa memiliki kondisi yang lebih beragam dan memerlukan kajian tersendiri. Secara temporal, penelitian difokuskan pada periode kolonial tahun 1900–1939, karena data mengenai aktivitas menabung masyarakat bumiputra di Jawa baru tersedia secara konsisten sejak awal abad ke-20, meskipun beberapa bank tabungan telah berdiri sejak pertengahan abad ke-19. Rentang waktu ini juga mencakup berbagai fase penting dalam sejarah ekonomi kolonial yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat bumiputra, termasuk dalam kaitannya dengan praktik menabung di bank.

### **Kemunculan Bank-Bank Tabungan dan Propaganda Tabungan**

Selain untuk mengakumulasi modal dari kalangan bumiputra, pendirian bank-bank tabungan di Hindia Belanda juga ditujukan untuk mendorong mereka untuk gemar menabung. Hal itu, dikarenakan Pemerintah kolonial memiliki anggapan bahwa masyarakat bumiputra tidak memiliki sikap gemar menabung (*spaarzin*). Hal ini dikaitkan dengan kondisi kemiskinan, gaya hidup konsumtif, serta dampak psikologis dari penindasan berkepanjangan oleh elite lokal bumiputra (Bree 1918, 468). Dalam pandangan pemerintah kolonial Belanda, ketiadaan budaya menabung dianggap sebagai salah satu penyebab utama stagnasi ekonomi dan keterbelakangan sosial masyarakat bumiputra (Bree 1918, 469). Pandangan tersebut mengabaikan kenyataan bahwa kemiskinan masyarakat bumiputra tidak terlepas dari penjajahan kolonial itu sendiri. Bahkan pendirian bank tabungan milik pemerintah juga bertujuan untuk mengakumulasi modal dari masyarakat bumiputra yang pada akhirnya digunakan untuk pembangunan negara induk (Belanda). Mekanismenya berlangsung melalui *Postspaarbank*, di mana dana tabungan yang tidak segera diperlukan untuk pembayaran kembali akan disimpan di *'s landskas* (kas negara di Hindia Belanda). Ketika dianggap tidak tersedia peluang investasi di Hindia Belanda, dana tersebut dikirim ke Belanda dan dikelola oleh *Rijkpostspaarbank* (Bank Tabungan Negara Belanda). Di Belanda, uang itu ditempatkan pada berbagai surat berharga seperti obligasi pemerintah Belanda, *municipality* (obligasi pemerintah kota/provinsi), surat utang lembaga publik, obligasi perusahaan kereta api, hipotek (jaminan properti), wesel, dan surat perbendaharaan (*Directie Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie* 1938, 11).

Pemerintah kolonial mendirikan *Postspaarbank* pada 1898 berdasarkan

Keputusan No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 tentang pendirian Bank Tabungan Pos di Batavia (Bree 1918, 475). Layanan *Postspaarbank* terintegrasi dengan jaringan kantor pos agar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pedesaan. Dalam struktur kelembagaannya, terdapat seorang bumiputra, yaitu R. A. Hoesein Djajadiningrat sebagai anggota Dewan sejak 1919 hingga 1935, yang kemudian digantikan oleh R. M. A. A. Koesoemo Oetoyo (wakil ketua pertama *Volksraad*) (*Directie Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie* 1938, 15). Selain itu, terdapat juga pegawai bumiputra yang dipekerjakan untuk mengurus para penabung bumiputra di *Postspaarbank*. Beberapa diantaranya adalah Djarkasih sebagai pegawai di kantor Batavia, serta R. Djokosarwono, M. Koesnadi, dan Djokosadono sebagai pegawai di kantor Surabaya (*Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 15 September 1936).

Meskipun kantor pusat *Postspaarbank* berada di Batavia, masyarakat bisa menabung uang mereka melalui kantor pos manapun yang telah ditunjuk untuk memberikan layanan penyetoran maupun penarikan tabungan dengan maksimal penarikan bulanan f100. Hingga tahun 1920, cabang *Postspaarbank* di wilayah Jawa dibagi ke dalam 17 *gewest* (wilayah administratif), yaitu Banten, Batavia, Priangan (Preanger Regentschappen), Cirebon, Pekalongan, Semarang, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Tayu, Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, dan Kediri (*Verslag Postspaarbank* 1921, 33).

Selain terintegrasi dengan kantor pos, berbagai kemudahan lain juga diberikan kepada masyarakat bumiputra untuk menabung uangnya di *Postspaarbank*. Misalnya, besaran jumlah setoran awal dan penarikan minimum ditetapkan sangat rendah, yaitu hanya 25 sen. Selain itu, *Postspaarbank* juga menerapkan sistem identifikasi menggunakan cap jempol bagi penabung yang tidak bisa menulis sehingga bisa memperluas minat penduduk bumiputra. Sementara itu, bagi pegawai negeri dan militer, *Postspaarbank* juga menerapkan skema tabungan dengan sistem pemotongan gaji, serta skema tabungan sekolah yang dilakukan secara kolektif melalui kepala sekolah (*Directie Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie* 1938, 10).

Selain bank tabungan milik pemerintah, terdapat juga bank tabungan swasta yang salah satunya diinisiasi oleh organisasi filantropis Belanda, yaitu *Maatschappij tot Nut van het Algemeen* (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 21 Juni 1909). Pendirian bank-bank tabungan swasta juga dibantu oleh *Javasche Bank* yang juga menjalankan fungsi kredit untuk lembaga swasta. Berdasarkan *octrooi Javasche Bank* tahun 1906, Gubernur Jenderal memberikan izin agar piutang hipotek dapat dijadikan jaminan pinjaman untuk mendukung bank-bank tabungan swasta yang sering kali tidak memiliki aset lain sebagai jaminan selain piutang hipotek (Stuart 1923, 31).

Setidaknya terdapat 5 bank tabungan swasta yang berdiri di Jawa sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pertama adalah *De*



*Spaarbank Te Semarang*, yang didirikan pada tahun 1853 sebagai sebuah yayasan dan disahkan sebagai bank pada tahun 1878 (Bree 1918, 543). Bank ini menawarkan skema tabungan biasa dan tabungan deposito. Kemudian pada 1857, berdiri *De Bataviasche Spaarbank* yang didirikan oleh *Maatschappij tot Nut van het Algemeen*, namun akhirnya memiliki status hukum sendiri yang disahkan oleh pemerintah pada 1904 (Bree 1918, 495). Pada 21 Juni 1859, berdiri *De Spaarbank Van De Maatschappij Tot Nut Van Het Algemeen Te Soerabaja* yang awalnya merupakan bagian dari organisasi di Belanda, lalu berdiri secara mandiri dan berstatus hukum dari pemerintah kolonial pada Desember 1859. Pada 1895, berdiri *Algemeene Spaar- en Depositobank* yang berdiri sebagai *Naamlooze Vennotschap* (NV) yaitu perseroan terbatas dengan modal dasar f100.000 yang dibagi menjadi 5 seri dengan masing-masing f20.000 (*Het Vaderland*, 12 Juni 1895). Kemudian, pada 1902 berdiri *De Spaarbank te Bandoeng* atas prakarsa Residen Preanger-Regentschappen, Jhr. E. Th. H. van Benthem van den Bergh. Melalui Surat Keputusan Pemerintah pada tanggal 7 Mei 1903 No. 1. Bank ini memperoleh status badan hukum dan mulai beroperasi secara resmi pada Juni 1903 (Bree 1918, 523).

Berbeda dengan *Postspaarbank* yang digunakan oleh banyak masyarakat bumiputra untuk menabung, bank-bank tabungan swasta lebih banyak digunakan oleh orang Eropa. Partisipasi masyarakat bumiputra di bank tabungan swasta sangat terbatas. Kemungkinan karena batas minimum setoran dan kebijakan terkait penarikan yang menyulitkan untuk masyarakat bumiputra yang hanya bisa menabung dalam jumlah kecil.

Untuk meningkatkan minat penabung, bank-bank tabungan melakukan berbagai propaganda dan memasang iklan di surat kabar. Propaganda yang dilakukan oleh *Postspaarbank* bersifat lebih formal dan terorganisir, disebarkan melalui jalur administrasi pemerintahan, diterbitkan dalam berbagai bahasa daerah, serta dikaitkan dengan program pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kedua, iklan-iklan milik bank tabungan swasta yang memanfaatkan media massa, terutama surat kabar sebagai alat utama untuk menjangkau masyarakat. Jenis iklannya secara umum berupa slogan-slogan yang persuasif dan iklan tentang layanan tabungan.

Strategi propaganda *Postspaarbank* dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye di pasar malam, pembuatan film, mengadakan lomba poster, menyebarkan poster dan brosur, memasang pengumuman di gerbong kereta api, dan beriklan di almanak (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 09 Desember 1925). Penyebaran poster, brosur, dan buku-buku kecil juga didukung oleh Komisi Bacaan Sekolah dan Bacaan Rakyat untuk Bumiputra (*Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur*), yang berbasis di Batavia (*Directie Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie* 1938, 37).

*Postspaarbank* juga melakukan propaganda secara visual dengan memproduksi film edukatif untuk mendorong kebiasaan menabung uang di

kalangan masyarakat bumiputra dengan menampilkan kisah kontras antara hidup boros dan hidup hemat melalui tokoh 'Aboer' dan 'Hemmat'. Film pertama yang ditulis oleh B.Th. Brondgeest dan diperankan oleh aktor-aktor bumiputra ini diputar pada tahun 1925 di Cinema Palace, Batavia, dan diperkuat dengan distribusi buku bergambar dari adegan film (*De Sumatra Post*, 19 Desember 1925). Pesan utama dari film tersebut menekankan bahwa menabung di *Postspaarbank* lebih aman daripada menyimpan uang di rumah. Pemutaran film ini berlanjut secara berkala dan pada tahun 1938, dalam rangka perayaan 40 tahun berdirinya *Postspaarbank*, diproduksi film baru oleh Radio-Holland yang menggambarkan kesejahteraan petani bumiputra berkat kebiasaan menabung, film ini kemudian diputar di Regina Theater pada 1938 (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 01 Juli 1938).

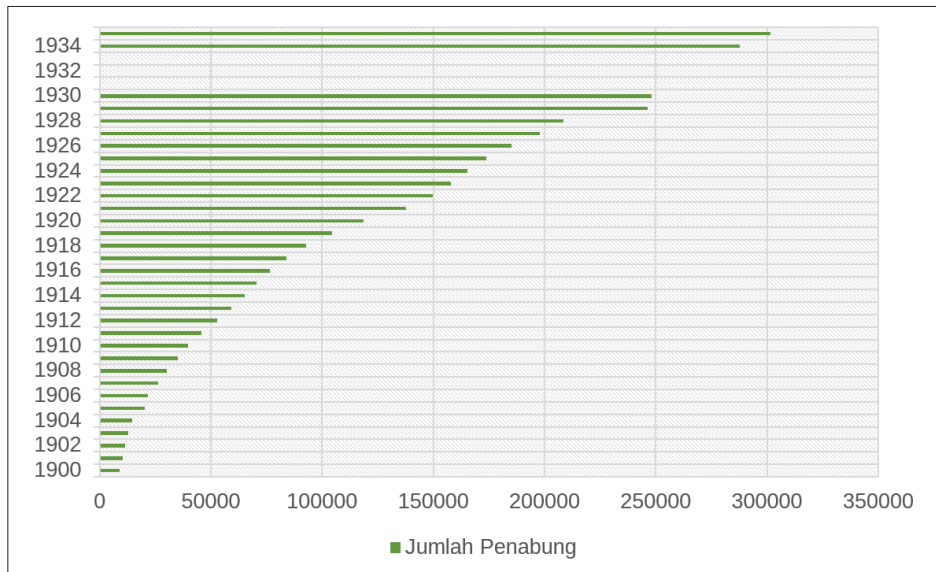
Selain melalui pembuatan film, *Postspaarbank* juga melakukan mengadakan kompetisi desain poster propaganda pada 1926, tentang manfaat dan keuntungan menabung di *Postspaarbank* (*De Indische Courant*, 09 Maret 1926). *Postspaarbank* juga memperluas jangkauan propaganda *Postspaarbank* melalui program *Schoolsparen* (tabungan sekolah) yang dimulai di sekolah-sekolah di wilayah Jawa dan Madura. Media yang digunakan adalah *spaarzegels* (perangko tabungan) dengan nilai 2 ½, 5, 10, dan 25 sen (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 Juni 1932). Pada 1933, *Postspaarbank* juga mengadakan lomba untuk menyusun buku bacaan anak-anak yang mengajarkan manfaat menabung (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 13 Januari 1933). *Postspaarbank* juga melakukan propaganda melalui iklan-iklan di berbagai surat kabar kolonial. Iklan-iklan tersebut menekankan pada keunggulan *Postspaarbank* sebagai bank tabungan milik pemerintah yang lebih terpercaya dan terjamin keamanannya.

Berbeda dengan *Postspaarbank* yang melakukan propaganda secara sistematis, bank-bank tabungan swasta banyak menerbitkan iklan berupa slogan-slogan persuasif dan informasi layanan di surat kabar kolonial, terutama pada tahun 1930an karena memburuknya situasi ekonomi akibat Depresi Besar sehingga diperlukan propaganda yang lebih masif. Misalnya slogan "*Sparen is Bewaren, Bewaren is Sparen*" (menabung adalah menyimpan, menyimpan adalah menabung) (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 04 Oktober 1930). Kemudian slogan seperti "*Pluk den Dag! is veilig door ons bewaren!*" (raih hari ini! Aman karena kami menyimpannya!) (*Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 September 1931). Selain slogan-slogan persuasif, iklan juga disampaikan dalam bentuk informasi layanan seperti jam operasional bank, layanan, besaran bunga, dan lain sebagainya.

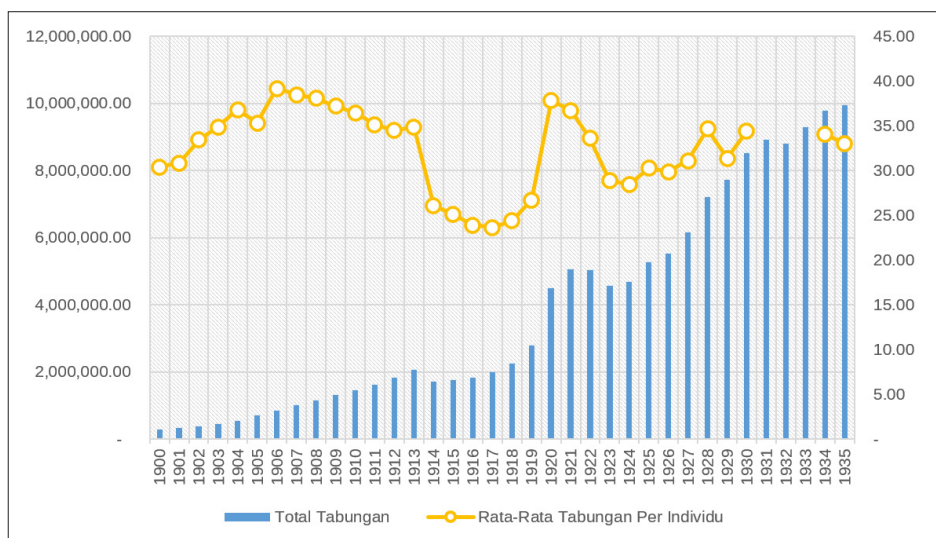
### **Tren Perkembangan Tabungan**

Perkembangan aktivitas menabung masyarakat bumiputra dapat dilihat dari data jumlah penabung, besaran tabungan, dan juga rata-rata tabungan





**Figur 1.** Jumlah Penabung Bumiputra di *Postspaarbank* (1900-1935). Sumber: Diolah dari L. De Bree, *Nederlandsch-Indie In De Twintigste Eeuw*, (Batavia: Ruygrok & Co, 1918), hlm. 492-494; *Verslag Postspaarbank*; dan Laporan *Postspaarbank* di berbagai surat kabar kolonial.



**Figur 2.** Total Tabungan dan Rata-rata Tabungan per Individu di *Postspaarbank* (dalam Satuan Gulden). Sumber: Diolah dari L. De Bree, *Nederlandsch-Indie In De Twintigste Eeuw*, (Batavia: Ruygrok & Co, 1918), hlm. 492-494; *Verslag Postspaarbank*; dan Laporan *Postspaarbank* di berbagai surat kabar kolonial.

per individu yang terdapat pada laporan-laporan bank tabungan. Tren perkembangan tabungan salah satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat bumiputra selama kurun waktu 1900-1939.

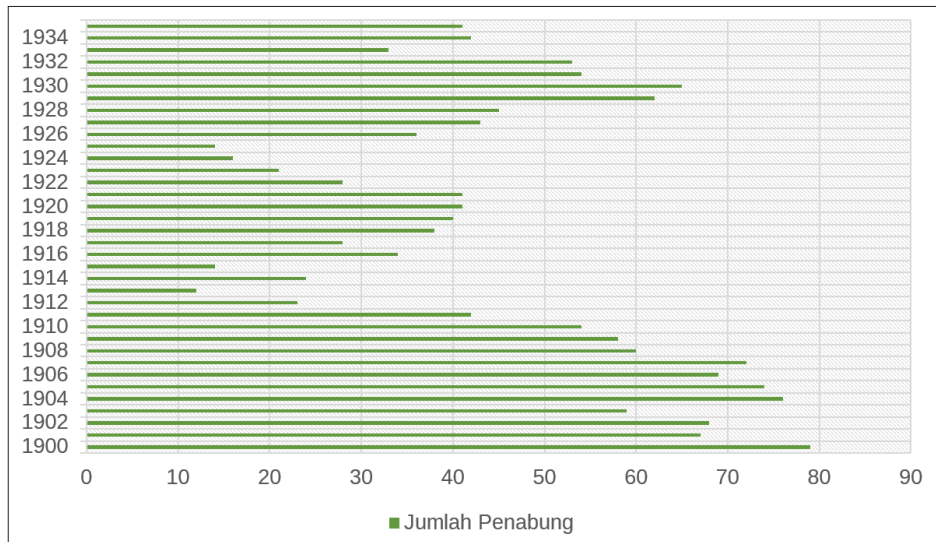
Figur 1 menunjukkan jumlah penabung dan Figur 2 menunjukkan total tabungan serta rata-rata tabungan per individu. Pada Figur 2, sumbu vertikal

kiri menunjukkan jumlah total tabungan dalam satuan juta gulden dan sumbu vertikal kanan menunjukkan rata-rata tabungan per individu (per gulden). Misalnya, pada tahun 1900, jumlah total tabungan hampir mencapai 2 juta gulden dengan rata-rata tabungan per individu kisaran 30 gulden.

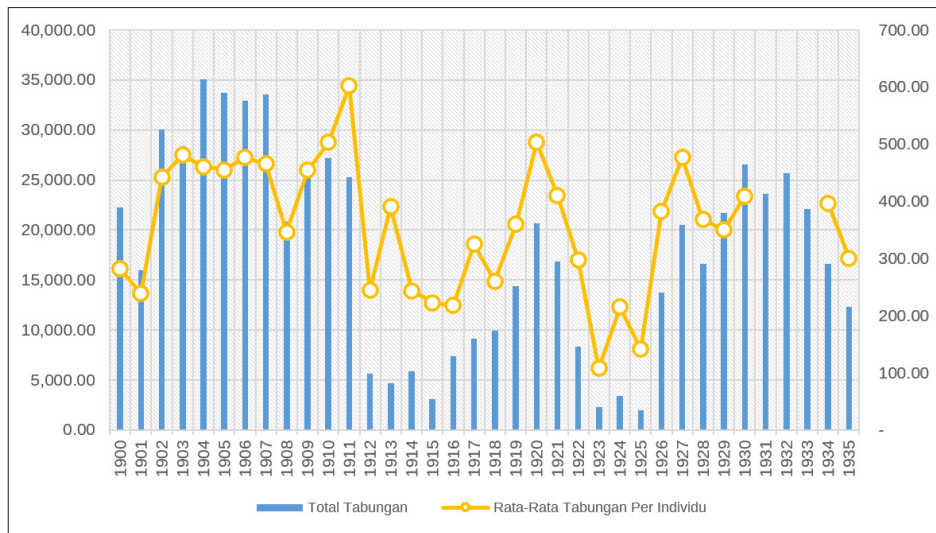
Berdasarkan data *Postspaarbank* pada figur 1 & 2, dapat dilihat bahwa jumlah penabung dan total tabungan di *Postspaarbank* mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 1898 hingga 1935. Sepanjang tahun 1900-1905, terjadi peningkatan 125% jumlah penabung dengan total tabungan naik dua kali lipat dan rata-rata tabungan per individu naik sekitar 16%. Pada 1906-1910, jumlah penabung meningkat sekitar 85%, total tabungan naik sekitar 72% namun rata-rata tabungannya turun sekitar 6,9%. Lalu pada 1911-1915, jumlah penabung tetap naik sekitar 53,8%, namun rata-rata tabungan per individu menurun cukup tajam, sekitar 28,6%. Baru pada periode 1916-1920, terjadi kenaikan yang sangat tajam, dari 76.548 menjadi 118.600 orang atau melonjak sekitar 55%, dengan rata-rata tabungan naik mencapai 58%. Pada lima tahun berikutnya, jumlah penabung dan jumlah tabungan tetap naik, namun rata-ratanya turun. Hingga tahun 1930-an, jumlah dan total tabungan terus meningkat namun rata-rata tabungan per individu mengalami penurunan. Secara keseluruhan, data *Postspaarbank* menunjukkan bahwa jumlah penabung dan total tabungan di *Postspaarbank* mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 1900 hingga 1935. Meskipun rata-rata tabungan per individu mengalami fluktuasi pada beberapa periode, namun rata-rata konsisten antara f20 hingga f30.

Pola yang terjadi di *Postspaarbank* berbeda dengan yang terjadi di bank tabungan swasta. Bank tabungan swasta mengalami fluktuasi yang lebih tajam baik dalam jumlah, besaran, maupun rata-rata tabungan per individu. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Figur 3.

Dari data jumlah penabung pada Figur 3, dapat diketahui bahwa sepanjang periode 1900-1935 jumlah penabung bumiputra di *Bataviasche Spaarbank* tidak pernah mencapai angka 100 orang. Namun, sebagaimana dapat dilihat pada Figur 4, rata-rata tabungan per individu di bank ini bisa mencapai ratusan gulden. Misalnya pada periode 1900-1905, rata-rata tabungan meningkat cukup tinggi, dari f238,58 di tahun 1901 melonjak menjadi f455,43 pada tahun 1905 (naik sekitar 91%). Pada 1910, rata-ratanya bahkan mencapai f500 meskipun jumlah penabungnya hanya 54 orang. Memasuki periode 1911 hingga 1915, jumlah penabung menurun drastis dari 42 menjadi hanya 14 orang (turun sekitar 66%). Rata-rata tabungan per individu juga menurun pada angka f200 saja. Selanjutnya terjadi kenaikan lagi pada periode 1916-1920 mencapai f500 per individu dan menurun tajam lagi pada 1920an, bahkan hanya f140 per individu. Pada periode 1930an juga terjadi fluktuasi, bahkan pada 1933, angkanya melonjak tajam mencapai f670 per individu.



**Figur 3.** Jumlah Penabung Bumiputra di *De Bataviasche Spaarbank* (1900-1935). Sumber: Diolah dari *Verslag der De Bataviasche Spaarbank 1859-1940*. Batavia: H. M. Van Dorp. (1940).



**Figur 4.** Total Tabungan dan Rata-rata Tabungan per Individu di *De Bataviasche Spaarbank* (dalam Satuan Gulden). Sumber: Diolah dari *Verslag der De Bataviasche Spaarbank 1859-1940*. Batavia: H. M. Van Dorp. (1940).

Secara keseluruhan, tren aktivitas menabung masyarakat bumiputra di *De Bataviasche Spaarbank* tergolong sangat fluktuatif. Tidak hanya jumlah penabung yang naik turun dengan tajam, tetapi juga rata-rata tabungan per individu yang kadang melonjak drastis dan di tahun berikutnya merosot tajam. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa *De Bataviasche Spaarbank* kemungkinan besar melayani kelompok sosial-ekonomi yang lebih sempit dibanding *Postspaarbank*, sehingga perubahan kecil dalam jumlah penabung

atau kondisi ekonomi dapat berdampak besar terhadap indikator rata-rata. Dengan kata lain, tren tabungan di *De Bataviasche Spaarbank* sangat sensitif terhadap dinamika eksternal dan jauh dari pola pertumbuhan yang stabil sepanjang tahun 1900 hingga 1935.

Fluktuasi tajam juga terjadi pada bank tabungan swasta lainnya. Kesamaan antara bank-bank tabungan swasta tersebut adalah jumlah penabung bumiputra yang cenderung sedikit dan mengalami fluktuasi tajam setiap tahunnya, namun rata-rata tabungannya cukup tinggi. Di *Spaarbank te Bandoeng* misalnya, data yang ditemukan menunjukkan bahwa jumlah penabung bumiputra sepanjang tahun 1908-1916 tidak mencapai 10 orang, namun rata-rata tabungan per individu mencapai ratusan bahkan ribuan gulden per orang.

Dalam melihat tren tabungan pada setiap bank, tentu tidak bisa dipisahkan dari konteks kondisi ekonomi Hindia Belanda pada masa itu. Jika dilihat dari tren masing-masing bank, terdapat beberapa periode yang menunjukkan fluktuasi tajam pada aktivitas menabung. Mulai dari Perang Dunia I (1914-1918), lalu *boom* ekonomi pada 1920, dan Depresi Besar pada 1930-an.

Sebagai koloni Belanda, Hindia Belanda juga mengalami dampak ekonomi yang cukup serius akibat Perang Dunia I yang berlangsung di Eropa sejak 1914. Struktur ekonomi Hindia Belanda yang bergantung pada ekspor hasil bumi dan impor barang industri mengalami masalah serius ketika terjadi gangguan pada jalur pelayaran internasional dan blokade laut oleh negara-negara Sekutu (Dijk 2007, 354). Para produsen komoditas ekspor seperti karet, teh, kopra, jagung, dan lainnya mengalami dampak yang sangat serius. Pada saat yang sama, harga barang-barang konsumsi pokok meningkat secara drastis. Banyak rumah tangga yang hanya makan sekali dalam sehari dan peningkatan jumlah barang yang digadaikan pada tahun-tahun ini menunjukkan cadangan ekonomi keluarga mengalami krisis (Dijk 2007, 516).

Menariknya, data menunjukkan bahwa pada masa Perang Dunia I, jumlah penabung bumiputra di *Postspaarbank* justru terus meningkat. Pada tahun 1914 tercatat 65.138 penabung, dan jumlah ini meningkat menjadi 92.602 pada tahun 1918. Total nilai tabungan juga naik dari 1,6 juta gulden pada 1914 menjadi 2,2 juta gulden pada 1918. Meskipun demikian, rata-rata tabungan per individu mengalami penurunan dari lebih dari f30 pada periode sebelum perang menjadi sekitar f20 selama periode perang. Penurunan rata-rata ini kemungkinan disebabkan oleh penarikan tabungan untuk menutupi kebutuhan hidup yang meningkat. Namun, rata-rata tabungan tersebut masih tergolong tinggi jika mempertimbangkan kondisi krisis saat itu.

Berbeda dengan *Postspaarbank*, bank-bank tabungan swasta mengalami fluktuasi yang jauh lebih tajam selama periode perang. Di *De Bataviasche Spaarbank*, jumlah penabung pada tahun 1914 tercatat sebanyak 24 orang,

kemudian turun menjadi 14 orang pada 1915, naik lagi menjadi 34 orang pada 1916, kembali menurun menjadi 28 orang pada 1917, dan naik lagi menjadi 38 orang pada 1918. Rata-rata tabungan per individu di bank ini juga menunjukkan tren penurunan, dari kisaran f 400 pada periode sebelum perang menjadi sekitar f 200 selama masa perang.

Fenomena serupa terjadi di *Algemeene Spaar-en Depositobank*, yang mencatat penurunan rata-rata tabungan dari f 205 pada 1913 menjadi f 167 pada 1914, dan turun lebih lanjut menjadi f 124 pada 1915. Sementara itu, di *De Spaarbank van de Maatschappij Tot Nut van het Algemeen te Soerabaja*, jumlah penabung meningkat dari sekitar 100-an orang menjadi mendekati 400 orang sepanjang periode perang. Namun, rata-rata tabungan di bank ini justru menurun drastis: dari kisaran f 300–500 pada periode sebelum perang menjadi hanya f 20–60 selama perang.

Fluktuasi tajam yang terjadi pada bank-bank tabungan swasta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat bumiputra yang menabung di bank-bank ini lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi makro. Pendapatan mereka sangat bergantung dengan stabilitas pasar. Oleh karena itu, ketika terjadi gangguan ekonomi, baik jumlah penabung maupun rata-rata simpanan per individu mengalami fluktuasi yang signifikan.

Memasuki tahun 1920, ekonomi Hindia Belanda mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari *boom* pascaperang setelah berakhirnya Perang Dunia I. Nilai ekspor melonjak tajam, bahkan mencapai dua miliar gulden (sekitar \$800 juta), terutama karena kenaikan harga komoditas dunia, bukan semata oleh peningkatan volume perdagangan (Lindblad 2002, 124). Meskipun sebagian besar keuntungan lonjakan ekspor ini hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar milik Belanda dan investor asing, namun tetap berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat bumiputra, terutama dari kelompok menengah.

*Postspaarbank* mencatat adanya peningkatan jumlah penabung menjadi lebih dari 100 ribu dari sebelumnya hanya 90 ribu. Total tabungan juga meningkat dari 2 juta gulden menjadi 4,4 juta gulden. Begitupun dengan rata-rata tabungan per individu yang meningkat dari kisaran f 20 pada masa Perang Dunia I menjadi f 37 pada 1920. Fenomena serupa juga tampak di *De Bataviasche Spaarbank*, meskipun tidak terjadi peningkatan jumlah penabung, saldo tabungan naik signifikan dari f 9.903 pada 1918 menjadi f 20.652 pada 1920. Rata-rata tabungan per individu pun meningkat tajam dari kisaran f 200–300 menjadi f 500. Di *De Spaarbank van de Maatschappij Tot Nut van het Algemeen te Soerabaja*, jumlah penabung naik dari 391 menjadi 456 pada tahun yang sama, dengan total tabungan naik dari f 14.391 menjadi f 20.652 dan rata-rata tabungan per orang dari f 36 menjadi f 45.

Namun, pemulihan ekonomi tersebut tidak bertahan lama. Sejak tahun 1921–1922, dunia mengalami resesi yang menyebabkan nilai ekspor Hindia



Belanda anjlok, sementara impor tetap tinggi, sehingga neraca perdagangan yang semula surplus berubah menjadi defisit (Lindblad 2002, 125). Dampaknya terlihat jelas pada penurunan aktivitas menabung masyarakat bumiputra, terutama di bank-bank swasta. Di *De Bataviasche Spaarbank*, jumlah penabung merosot drastis menjadi hanya 28 orang pada 1922, dengan total tabungan turun ke f 8.349, dan rata-rata tabungan per individu yang sebelumnya mencapai f 503 pada 1920, menurun menjadi f 298 pada 1922 dan terus menurun hingga f 215 pada 1925. Tren serupa juga terlihat di *Spaarbank te Semarang*, di mana rata-rata tabungan per individu turun dari f 105 pada 1920 ke titik terendah hanya f 8,81 pada 1923 dan f 8,13 pada 1925.

Berbeda dengan bank-bank tabungan swasta, penabung di *Postspaarbank* menunjukkan ketahanan yang relatif stabil. Setelah 1920, jumlah penabung terus meningkat, dengan total simpanan tetap berada di kisaran 4–5 juta gulden. Rata-rata tabungan per individu juga bertahan stabil di kisaran f 30. Hal tersebut menunjukkan bahwa penabung bumiputra di *Postspaarbank* memang tidak memiliki kemampuan finansial yang sangat tinggi seperti di bank-bank swasta, namun kondisi ekonominya cenderung lebih stabil.

Bahkan, ketika terjadi Depresi Besar pada dekade 1930-an, data menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat bumiputra yang mampu menabung. Tren di *Postspaarbank* menunjukkan bahwa jumlah penabung pada tahun 1930 tercatat lebih dari 200 ribu orang, dengan total simpanan mencapai 8,5 juta gulden. Rata-rata tabungan per individu bahkan melebihi f 30, dan angka ini tetap stabil sepanjang dekade tersebut. Pada tahun 1938, rata-rata tabungan per penabung meningkat menjadi sekitar f 40.

Situasi yang berbeda tampak di *De Bataviasche Spaarbank*. Jumlah penabung mengalami fluktuasi tajam: dari 65 orang pada tahun 1930, turun menjadi 33 orang pada 1933, lalu kembali naik menjadi 64 orang pada 1938. Meskipun jumlah penabung sempat merosot, nilai rata-rata tabungan tetap tinggi. Pada periode 1930–1932, rata-rata simpanan per penabung berada di kisaran f 400, bahkan melonjak drastis menjadi f 671 pada saat jumlah penabung hanya 33 orang. Setelah itu, nilai rata-rata mengalami penurunan bertahap ke kisaran f 300 hingga 1937, dan turun lebih lanjut ke sekitar f 200 pada 1938. Sementara itu, di *Spaarbank te Semarang*, jumlah penabung relatif stabil, tetapi nilai rata-rata tabungan menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 1929, rata-rata tabungan mencapai f 192, namun menurun tajam menjadi f 93 pada 1930, dan terus turun menjadi f 88 pada 1931.

### Latar Belakang Sosial Para Penabung

Identitas sosial para penabung bumiputra dapat diketahui dari laporan tahunan *Postspaarbank*, yang mengelompokkan penabungnya ke dalam beberapa kategori: pegawai dinas pegadaian (*personeel pandhuisdienst*), pegawai negeri (*landsdienaren*), perseorangan (*particulieren*), perempuan (*vrouwen*),

anak-anak (*kinderen*), anggota dan pegawai pemerintahan desa (*leden en beambten desabesturen*), kas desa (*desakassen*), serta perkumpulan atau organisasi sosial (*vereenigingen*) (*Verslag Postspaarbank* 1921, 27). Keberagaman kategori ini mencerminkan beragam latar belakang sosial-ekonomi yang luas, namun umumnya berasal dari kelompok dengan pendapatan tetap utamanya dari kalangan pegawai pemerintah atau pegawai desa, yang memiliki jaringan sosial yang mapan. Namun, meskipun terdapat penjelasan tentang golongan para penabung bumiputra di *Postspaarbank*, tetapi tidak ada data detail mengenai besaran tabungan per golongan.

Selain itu, sumber-sumber lain dari surat kabar kolonial juga menyebutkan kalangan militer bumiputra sebagai penabung, khususnya mereka yang termasuk dalam “*militairen in de 2e klasse van militaire discipline*”, yakni tentara bumiputra berpangkat rendah dalam struktur *Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger* (KNIL) (*De Preanger-bode*, 02 September 1908). Di samping itu, terdapat pula para guru bumiputra yang tidak hanya menabung secara pribadi, tetapi juga mendorong kegiatan menabung di kalangan siswa bumiputra di sekolah (*De Locomotief*, 10 Mei 1921).

Di kalangan pegawai negeri bumiputra, aktivitas menabung dilakukan melalui sistem pemotongan gaji secara otomatis setiap bulan (*De Preanger-bode*, 02 September 1908). Mekanisme serupa juga berlaku bagi kalangan militer bumiputra, di mana tabungan mereka dikelola langsung oleh *Postspaarbank* melalui jalur administrasi militer. Sistem ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam kegiatan menabung bukan semata-mata didasarkan pada pilihan individu secara sukarela, melainkan bagian dari pengaturan kelembagaan yang bersifat sistemik. Dengan kata lain, proses menabung telah dirancang dan diintegrasikan ke dalam sistem penggajian, sehingga para pegawai dan militer secara rutin dan konsisten menyisihkan sebagian pendapatannya, terlepas dari fluktuasi kondisi ekonomi makro.

Implikasi dari sistem ini terlihat jelas dalam stabilitas tren tabungan di *Postspaarbank* sepanjang periode perang dunia I (1914-1918) maupun saat krisis ekonomi global pada awal 1930-an. Meskipun terjadi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok, penarikan dana oleh penabung hanya bersifat parsial. Sebagian besar penabung tidak menarik seluruh tabungan mereka, dan proses pemotongan gaji yang terus berjalan setiap bulan memastikan adanya arus masuk dana yang berkelanjutan ke dalam rekening mereka. Oleh karena itu, meskipun sempat terjadi penarikan tabungan selama masa krisis, tren secara keseluruhan tetap stabil.

Dalam struktur sosial kolonial, para penabung di *Postspaarbank* dapat digolongkan ke dalam kelas menengah bumiputra. Mereka adalah golongan yang tumbuh bersamaan dengan kebijakan kolonial, khususnya Politik Etis, yang membuka peluang pendidikan dan pekerjaan baru bagi masyarakat bumiputra. Golongan ini mencakup guru, juru tulis, pegawai negeri

rendahan, teknisi, jurnalis, pegawai bank, pekerja kereta api, dan pekerja kantor pos (Hoogervorst & Nordholt 2017, 443). Pada 1930, diperkirakan terdapat lebih dari 600.000 orang yang termasuk dalam kelas menengah bumiputra, dengan pendapatan tahunan antara f200 hingga f1.000. Mereka yang penghasilan di atas f1.000 digolongkan sebagai elite bumiputra. Jika memasukan semua anggota keluarga mereka, populasi kelas menengah urban di Jawa dan Madura dapat mencapai hampir 2 juta jiwa atau sekitar 5% dari total penduduk (Hoogervorst & Nordholt 2017, 451).

Kelas menengah ini memiliki kecenderungan untuk meniru budaya Barat dengan budaya konsumsi yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Mereka aktif membeli barang-barang impor serta mengikuti gaya hidup kosmopolitan (Hoogervorst & Nordholt 2017, 445). Mereka sering pergi ke pasar malam dan pameran seperti di Pasar Gambir, membeli barang-barang modern, membeli makanan Barat, dan menghabiskan uangnya untuk hiburan urban seperti bioskop dan pertunjukan tari (Meer 2017, 511). Mereka tidak segan-segan menghabiskan gaji untuk berfoya-foya dalam semalam bahkan rela berhutang. Dalam konteks ini, sistem tabungan dengan pemotongan gaji otomatis bermanfaat untuk mereka agar tetap memiliki tabungan dan tidak menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi sesaat.

Di wilayah perdesaan, aktivitas menabung mulai menjadi bagian dari sistem kelembagaan, terlihat dari keterlibatan aparat desa dan lembaga resmi seperti kas desa dalam sistem tabungan *Postspaarbank*. Pada tahun 1920, laporan *Postspaarbank* mencatat bahwa kelompok anggota dan pegawai pemerintahan desa memiliki total tabungan sebesar f15.423,30. Selain itu, kas desa (*desakassen*) juga tercatat sebagai penabung institusional, dengan total tabungan f1.953,90 (*Verslag Postspaarbank* 1920, 27). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tabungan di *Postspaarbank* telah menjangkau hingga ke birokrasi tingkat desa, mencerminkan penetrasi sistem perbankan kolonial hingga ke struktur birokrasi lokal yang paling bawah.

Selain itu, *Postspaarbank* juga memfasilitasi tabungan anak-anak sekolah melalui sistem tabungan berbasis perangko. Pada tahun 1920, total tabungan anak-anak sekolah tercatat sebesar f 2.0786,63. Di sisi lain, masyarakat bumiputra umum (*particulieren*) turut berpartisipasi dalam praktik menabung dengan total simpanan f3.160,06 (*Verslag Postspaarbank* 1920, 27). Data ini menunjukkan bahwa aktivitas menabung tidak hanya terbatas pada kalangan pegawai, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk institusi desa dan anak-anak sekolah, sehingga memperlihatkan jangkauan sosial *Postspaarbank* yang cukup luas di kalangan bumiputra.

Laporan *Postspaarbank* juga menyebutkan secara khusus golongan perempuan (*vrouwen*). Kelompok ini mendapat perhatian khusus dalam sistem *Postspaarbank* melalui kebijakan yang tergolong progresif untuk konteks

zamannya. Perempuan, termasuk yang telah menikah, diberi otonomi penuh atas tabungan mereka tanpa memerlukan persetujuan atau campur tangan suami. Bahkan jika suami ingin menarik dana dari rekening istri, diperlukan izin tertulis dari pihak istri (Zaalberg 1911, 29-30). Pada tahun 1920, simpanan atas nama perempuan tercatat sebesar f 826,06 (*Verslag Postspaarbank* 1920, 27).

Salah satu temuan menarik dalam laporan *Postspaarbank* adalah partisipasi narapidana bumiputra dalam kegiatan menabung. Selama masa hukuman, seluruh upah kerja mereka di penjara dikelola langsung oleh *Postspaarbank* dan disimpan atas nama masing-masing narapidana. Pada tahun 1922, total tabungan narapidana bumiputra mencapai f 36.082,20, atau sekitar 89% dari keseluruhan tabungan narapidana di Hindia Belanda. Tabungan ini hanya dapat diambil setelah mereka bebas, sehingga saat keluar dari penjara, mereka telah memiliki bekal finansial untuk memulai kembali kehidupan di masyarakat (*De Sumatra Post*, 07 Agustus 1923).

Melihat komposisi para penabung di *Postspaarbank* sebagaimana tercatat dalam laporan tahunannya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari golongan priayi, terutama para priayi baru atau intelektual. Kategori penabung seperti pegawai negeri, guru, mantri kesehatan, pegawai pegadaian, dan anggota pemerintahan desa mencerminkan formasi yang erat kaitannya dengan struktur birokrasi kolonial. Sejak abad ke-19, golongan priayi tidak lagi menjalankan kekuasaan tradisional secara otonom, melainkan telah diintegrasikan ke dalam sistem administrasi kolonial dan hanya menjadi pejabat yang digaji oleh pemerintah Belanda (Scherer 2012, 5-6; Kartodirdjo dkk. 1987, 17-18). Sebagai pegawai pemerintah kolonial, mereka digaji dan gajinya dipotong secara otomatis untuk ditabungkan di *Postspaarbank*.

Lebih jauh, munculnya kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20 membuka peluang pendidikan Barat bagi anak-anak priayi dan mempercepat terbentuknya kelas menengah terdidik dari kalangan bumiputra. Priayi birokratis tetap menduduki jabatan-jabatan *pangrehpraja*, sedangkan priayi profesional mulai mengisi posisi-posisi seperti guru, dokter Jawa, mantri kesehatan, mantri hewan, dan teknisi pemerintah — jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan muncul sebagai bagian dari perluasan kepentingan kolonial (Kartodirdjo dkk. 1987, 21-22). Para penabung di *Postspaarbank* dari kalangan ini mencerminkan transformasi priayi menjadi kelas menengah urban yang hidup dalam dunia administrasi modern, tetapi tetap mempertahankan gaya hidup dan simbol-simbol status sosial yang kuat, seperti orientasi terhadap status dan jaringan perkawinan dalam keluarga priayi (Kartodirdjo dkk. 1987, 21-22). Sistem potong gaji otomatis dari pemerintah kolonial yang mendorong budaya menabung mencerminkan bentuk baru disiplin finansial serta identitas sosial mereka sebagai bagian dari elite kolonial bumiputra, atau yang oleh Sartono Kartodirdjo disebut sebagai

“*new breed*” dengan kepribadian khas hasil penyesuaian terhadap lingkungan sosial budaya Jawa modern menjelang Perang Dunia II (Kartodirdjo dkk. 1987, 169).

Meskipun golongan priayi tergolong sebagai elit perkotaan (*urban elite*), penabung *Postspaarbank* tidak terbatas pada wilayah kota semata. Laporan *Postspaarbank* menunjukkan bahwa sejumlah tabungan berasal dari pegawai desa, bahkan termasuk simpanan milik kas desa. Selain itu, kantor cabang *Postspaarbank* tersebar di berbagai kota besar dan menengah. Namun, tidak ditemukan pola yang konsisten mengenai lokasi cabang tersebut, apakah selalu berada di tingkat kabupaten (*regentschap*) atau distrik. Kemungkinan juga terjadi perubahan status administratif wilayah—misalnya, dari distrik menjadi *regentschap*—yang membuat pola persebaran kantor cabang *Postspaarbank* semakin sulit dipastikan secara pasti. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kantor cabang *Postspaarbank* terkonsentrasi di kota-kota besar dan menengah. Sementara itu, jangkauan layanan bank tersebut tampaknya mengikuti jaringan kantor pos yang telah tersebar hingga tingkat distrik di Pulau Jawa, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat pedesaan (Benschop & Icke 1918, 48-49).

Berbeda dengan penabung di *Postspaarbank*, data mengenai golongan sosial penabung di bank-bank tabungan swasta tidak ditemukan secara eksplisit. Namun dengan melihat tren tabungannya, kemungkinan besar mereka adalah para pengusaha, pedagang besar, atau individu dari kalangan elite bumiputra yang terlibat langsung dalam sektor ekonomi ekspor-impor. Ketergantungan pada arus perdagangan global membuat pendapatan mereka sangat rentan terhadap gangguan ekonomi, seperti perang atau depresi. Hal ini menjadi kontras dengan kondisi penabung di *Postspaarbank*, yang cenderung lebih stabil karena berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan tetap dan terintegrasi dalam sistem birokrasi kolonial.

Jika dilihat dari persebaran bank-bank tabungan swasta yang umumnya berlokasi di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Batavia—yang pada masa kolonial telah berstatus sebagai *gemeente* (kota praja)—maka tampak bahwa kehadiran lembaga keuangan swasta ini sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi dan tata kelola kota yang lebih maju. Kota praja adalah bentuk pemerintahan kota otonom di Hindia Belanda yang dibentuk sebagai hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903 (Hestiliani 2019, 213). Batavia telah berstatus sebagai kota praja sejak tahun 1905, disusul oleh Bandung, Semarang, dan Surabaya pada tahun 1906. Pendirian bank-bank tabungan swasta di kota-kota tersebut tidak terlepas dari potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah. Di Surabaya, misalnya, pertumbuhan ekonomi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 didorong oleh perannya sebagai pusat distribusi komoditas ekspor, yang didukung oleh letaknya yang strategis di



muara Sungai Brantas. Selain itu, pengembangan jaringan rel kereta api yang menghubungkan Surabaya dengan daerah pedalaman turut memperlancar arus perdagangan. Pemerintah kolonial juga menetapkan Surabaya sebagai *collecting center* dan lokasi bagi industri strategis seperti *Marine Etablissement*. Modernisasi kota turut berlangsung melalui pembangunan infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalan raya, dan pasar, yang semakin memperkuat posisi Surabaya sebagai pusat ekonomi di kawasan timur Hindia Belanda (Andana dkk. 2021, 149-150). Ciri yang serupa juga terjadi di wilayah-wilayah besar lain di Jawa. Oleh karena itu, bank-bank tabungan swasta mulai didirikan di sana, karena kota-kota ini menawarkan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi aktivitas keuangan, baik oleh pengusaha bumiputra maupun kelompok masyarakat lainnya.

## Kesimpulan

Aktivitas menabung di kalangan masyarakat bumiputra pada masa kolonial merupakan bagian dari dinamika sosial-ekonomi yang terbentuk di bawah pengaruh kebijakan pemerintah kolonial. Sebelum mengenal tabungan bank, masyarakat sudah melakukan aktivitas menabung dalam bentuk barang berharga, hasil pertanian, ternak, maupun tabungan jasa berbasis gotong royong. Namun, dengan meningkatnya monetisasi akibat penetrasi ekonomi kolonial, uang mulai dipandang sebagai bentuk nilai yang layak disimpan. Hal ini membuka jalan bagi tabungan formal di bank, sebuah transformasi yang lebih banyak ditentukan oleh kepentingan kolonial daripada kesadaran ekonomi masyarakat.

Meski demikian, peningkatan jumlah penabung di *Postspaarbank* tidak mencerminkan kesadaran ekonomi individual. Kestabilan tabungan terutama dihasilkan oleh kebijakan struktural, khususnya sistem pemotongan gaji otomatis bagi pegawai dan militer bumiputra. Dengan skema ini, tabungan menjadi bagian dari sistem penggajian kolonial, bukan keputusan mandiri. Karena itu, meskipun terjadi krisis seperti Perang Dunia I dan Depresi 1930-an, jumlah penabung tetap meningkat dan rata-rata tabungan per individu jumlahnya relatif stabil.

Upaya Pemerintah Kolonial mendorong budaya menabung dilakukan melalui propaganda bank, tetapi iklan-iklan yang umumnya berbahasa Belanda membuat sasaran terbatas pada bumiputra terdidik dengan akses pendidikan. Dengan demikian, sejak awal aktivitas menabung tidak sepenuhnya berjalan mengikuti mekanisme ekonomis, melainkan melibatkan intervensi struktural dari kekuasaan birokrasi kolonial. Hal ini menjelaskan mengapa penabung mayoritas berasal dari priayi, pegawai negeri, guru, pegadaian, mantri kesehatan, pamong desa, serta kalangan *middenstand* yang sedang tumbuh. Layanan *Postspaarbank* memang menjangkau hingga pedesaan melalui kantor pos, tetapi tetap lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok berpenghasilan

tetap yang memiliki kaitan atau posisi tertentu dalam birokrasi kolonial.

Sementara itu, bank swasta seperti *De Bataviasche Spaarbank*, *De Algemeene Spaar-en Depositobank*, dan *Spaarbank* di kota-kota besar lebih eksklusif melayani elit perkotaan. Jumlah penabung bumiputra di bank swasta kecil, tetapi rata-rata jumlah tabungannya tinggi, menunjukkan mereka berasal dari kelompok mapan secara ekonomi, kemungkinan besar pengusaha atau pedagang. Namun, kelompok ini lebih rentan terhadap fluktuasi global, terbukti dari tajamnya penurunan jumlah dan nominal tabungan saat terjadi krisis ekonomi. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa aktivitas menabung masyarakat bumiputra pada masa kolonial bukanlah fenomena ekonomis murni yang tumbuh dari inisiatif masyarakat (*bottom-up*), melainkan fenomena politik-struktural, yang didesain oleh dan terikat dengan kepentingan kolonial (*top-down*).

### Catatan Penulis

Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis yang berjudul “Aktivitas Menabung Masyarakat Bumiputra di Jawa, 1900–1939”, yang disusun di bawah bimbingan Dr. Abdul Wahid pada Program Studi Sejarah, Universitas Gadjah Mada, tahun 2025. Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga pengembangan artikel ini.

### Referensi

#### Artikel dan Buku

- Alexander, Jennifer & Alexander, Paul. 1982. “Shared Poverty as Ideology: Agrarian Relationship in Colonial Java.” *Man* 17 (4): 597-619.
- Benschop, W. J. M. & Icke, H. 1918. *Een Korte Geschiedenis van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie Ter Herdenking Van Zijn Vijf En Twintig Jarig Bestaan Samengesteld Door*. ‘S-Gravenhage.
- Bree, L. De. 1918. *Nederlandsch-Indie in De Twintigste Eeuw*. Batavia: Ruygrok & Co.
- Christie, Jan Wisseman. 1998. “Javanese Markets and the Asian Sea Trade Boom of the Tenth to Thirteenth Centuries A.D.” *Journal of Economic and Social History of the Orient* 41 (3): 344-381.
- Dick, Howard. 1985. “The Rise of a Middle Class and the Changing Concept of Equality in Indonesia: An Interpretation.” *Indonesia* 39: 71-92.
- Dijk, van Kees. 2007. *The Netherlands Indies and The Great War 1914-1918*. Leiden: KITLV Press.
- Directie Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie. 1938. *40 Jaar Postspaarbank in Nederlandsch-Indie*. Batavia: Postspaarbank in Nederlandsch Indie.
- H, Zaalberg. 1911. *De Postspaarbank in Nederlandsch Indie Voorschriften Betreffende De Postspaarbank, Welke Van Belang Zijn Voor De Inleggers en Hen, Die Het Wenschen Te Worden, Met Enkele Modellen*. Batavia: Postspaarbank.
- Hoogervorst, Tom & Nordholt, H, S. 2017. “Urban Middle Classes in Colonial Java (1900-1942): Images and Language.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en*

- Volkenkunde* 173(4): 442-474.
- Lindblad, J. Thomas. 2002. "The Late Colonial State an Economic Expansion, 1900-1930s." Dalam *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*, dieditori oleh Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, dan Thee Kian Wie. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Meer, van der Arnout. 2017. "Performing Colonial Modernity: Fairs, Consumerism, and the Emergence of the Indonesian Middle Classes." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 173 (4): 503-538.
- Mufidha Brilian Irianti. 2014. "Dampak Propaganda Gerakan Menabung Jepang Terhadap Pola Penyimpanan Uang Masyarakat Indonesia (1942-1945)." Tesis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Muhammad Lingga Andana, Izza Yuspriana Afhimma, dan Silvia Nurul Ashiva. 2021. "Perkembangan Tata Kota Surabaya pada Tahun 1870-1940." *Journal of Indonesian History and Education* 1(2): 146-155.
- Prapto Yuwono, Munawar Holil, I Made Suparta. 2002. "Tradisi Menabung Masyarakat Jawa di Surakarta." *Laporan Hasil Penelitian Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia*.
- Sartono Kartodirdjo. 2019. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
- Scherer, Savitri. 2012. *Keselarasannya & Kejanggalaan: Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Depok: Komunitas Bambu.
- Stuart, Verrijn. 1923. *Het Bankwezen in De Nederlandsch Kolonien*. Wassenaar: N.V. Uitgeverij Maatschappij Voorheen G. Delwel.
- Supratikno Rahardjo, Nunus Supardi, dan Erwien Kusuma. 2019. *Menabung Membangun Bangsa*. Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Teti Hestiliani. 2019. "Decentralisatie Wet Van Nederlandsch Indies 1903." *ISTORIA* 15 (2): 206-215.
- Verslag Omtrent Den Dienst Der Postspaarbank in Nederlandsch-Indie Over Het Jaar 1920*. Weltevreden: Albrecht & Co., (1921).

## Surat Kabar

- "De Postspaarbank", *De Preanger-bode*, 02 September 1908.
- "De Postspaarbank-film", *Bataviaasch Nieuwsblad*, 09 Desember 1925.
- "De Postspaarbank-film", *De Sumatra Post*, 19 Desember 1925.
- "De Propaganda-film", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 01 Juli 1938.
- "Deelnemings-Voorwarden Prijsvraag Propagandaplaat vood de Postspaarbank in N.I.", *De Indische Courant*, 09 Maret 1926.
- "Financieel", *Het Vaderland*, 12 Juni 1895.
- "Het Schoolsparen Heeft Reeds Succes", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 Juni 1932.
- "Het Schoosparen", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 13 Januari 1933.
- "Nut van het Algemeen", *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 21 Juni 1909.
- "Pluk den Dag!", *Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 September 1931.
- "Postspaarbank in Nederlandsh-Indie", *Java-post; weekblad van Nederlandsch-Indië*. Jrg 2, 1904, No. 28, 09 Juli 1904.
- "Postspaarbank in Ned-Indie", *Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 15 September 1936.

“Sparen is Bewaren, Bewaren is Sparen,” *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 04 Oktober 1930.